



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan A.P Pettarani No. 1 – Telp. (0411)-872164, Fax (0411)-854010  
MAKASSAR 90221



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 0866/IX/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 5 September 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DR. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19820306 200012 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; dan
3. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 0866/IX/TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>FORMULASI</b>
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan BAPENDA Prov. Sulsel	Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah x 100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	UPTP Wil. Lingkup BAPENDA Prov. Sulsel	Total Nilai Semua Unsur / (Jumlah Responden x Jumlah Unsur) x 25

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**DR. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19820306 200012 1 001